

SKRIPSI

**PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN
INFLASI PADA HARGA PASAR DAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN**

Oleh:

**HENDRI ARI SETIAWAN
NPM. 1903022006**



**Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN
INFLASI PADA HARGA PASAR DAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN**

Diajukan Untuk Menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Perbankan Syariah dan
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Hendri Ari Setiawan
NPM. 1903022006

Pembimbing Skripsi : Enny Puji Lestari M.E.Sy

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metro-puiniv.ac.id E-mail iaimetro@metro-puiniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan blmbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Hendri Ari Setiawan
NPM : 1903022006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN
INFLASI PADA HARGA PASAR DAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 24 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIP. 198106132025212002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN
INFLASI PADA HARGA PASAR DAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN
Nama : Hendri Ari Setiawan
NPM : 1903022006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo
Lampung.

Metro, 24 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIP. 198106132025212002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl.Hajar Dewantara Kampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1600/In-28.3/D/11-00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN INFLASI PADA HARGA PASAR DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN, disusun oleh: HENDRI ARI SETIAWAN, NPM: 1903022006, Prodi: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 30 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Enny Puji Lestari, M.E.Sy.

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy.

Penguji II : Ananto Triwibowo, ME.

Sekretaris : Primadatu Deswara, SKM., MPH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN INFLASI PADA HARGA PASAR DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Oleh :

HENDRI ARI SETIAWAN

Inflasi merupakan permasalahan fundamental dalam perekonomian yang apabila tidak dikendalikan, dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat serta mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, yang dilakukan melalui pengendalian inflasi dan penguatan sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pada harga pasar, serta hubungannya dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi Bank Indonesia, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen regulasi seperti UU No. 23 Tahun 1999. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi relasional, yang bertujuan mengkaji hubungan antar konsep seperti inflasi, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah memainkan peran signifikan melalui kerangka kerja Inflation Targeting Framework (ITF), koordinasi lintas lembaga seperti TPIP dan TPID, serta penggunaan berbagai instrumen makroprudensial. Selain itu, strategi penguatan komunikasi kebijakan turut mendukung pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga memantau risiko sistemik dan menjaga kesehatan sektor perbankan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Bank Indonesia terbukti adaptif dan strategis dalam merespons dinamika ekonomi, khususnya dalam konteks pasca pandemi dan krisis harga pangan global.

Kata Kunci : *Bank Indonesia, Inflasi, Stabilitas Sistem Keuangan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Ari Setiawan

NPM : 1903022006

Prodi : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025
Yang menyatakan



Hendri Ari Setiawan
NPM. 1903022006

MOTTO

إِغْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ

..... ﴿٢٠﴾

Artinya: Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur.... (QS. Al-Hadid : 20)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta keridhoan-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa hormat, cinta, dan terima kasih Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Ku tersayang, Bapak Basori dan Ibu Siti Hartini serta saudaraku dan keluarga besar yang tiada henti memanjatkan doa, mendukung, memberikan semangat, dan menanti dengan kesabaran.
2. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.S.y selaku Dosen Pembimbing, saya haturkan Terima Kasih telah membantu membimbing, memberikan kritikan maupun saran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepala Jurusan Perbankan Syariah dan sekertaris jurusan Perbankan Syariah yang memberikan motivasi kepada saya dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya.
4. Sahabat-sahabat yang tak hentinya memotivasi dan memberikan semangat saya haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat: Didi Pranata, dan Abdour rouf.
5. Saudara dari keluarga ibu saya yang memotivasi saya dan memberikan tumpangan untuk saya mengerjakan skripsi saya sampai selesai saya haturkan terimakasih kepada om Putra dan bik Nia.
6. Almamater kebanggaanku IAIN Metro yang menjadi tempat penulis menuntut ilmu.

Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas taufik dan hidayahNya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Stara Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E. Dalam upaya penyelesaian penyusunan Skripsi ini, Peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anggoro Sugeng, S.E.I., M.Sh.Ec selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syari'ah
4. Enny Puji Lestari M.E.Sy selaku Pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi.
5. Kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam segala hal.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat dan memenuhi syarat.

Metro, 13 Juni 2025
Peneliti,



Hendri Ari Setiawan
NPM. 1903022006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian yang Relevan.....	8
E. Metodologi Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Inflasi.....	14
1. Pengertian Inflasi	14
2. Jenis-Jenis Inflasi	16
3. Penyebab Terjadinya Inflasi.....	18
4. Dampak Inflasi	20
5. Inflasi dalam Konteks Kebijakan Moneter	22
B. Stabilitas Sistem Keuangan.....	25
1. Pengertian Stabilitas Sistem Keuangan.....	25

2. Faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan	26
3. Hubungan Inflasi dengan Stabilitas Sistem Keuangan	27
4. Risiko Sistemik dalam Sistem Keuangan	28
C. Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi	30
1. Pengertian dan Fungsi Bank Indonesia	30
2. Kebijakan Moneter Bank Indonesia.....	31
3. Strategi Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi.....	32
4. Peran BI terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Nasional.....	34
D. Teori-Teori yang Relevan	35
1. Grand Theory: Teori Inflasi	36
2. Middle Range Theory: Teori Kebijakan Moneter.....	38
3. Applied Theory: Stabilitas Sistem Keuangan	39
E. Kerangka Berpikir.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi Harga Pasar.....	46
B. Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional.....	54
C. Analisis Perbandingan dan Implementasi Peran Bank Indonesia dalam pengendalian Inflasi pada harga pasar dan stabilitas sistem keuangan	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian suatu negara, kestabilan harga barang dan jasa merupakan salah satu indikator utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu pengendalian pada tingkat inflasi suatu negara menjadi bagian fundamental untuk dikelola dalam batas yang terkendali agar supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian nasional dapat tumbuh secara optimal. Menurut Frederic S. Mishkin, stabilitas harga merupakan salah satu tujuan utama kebijakan moneter, karena tanpa stabilitas harga mustahil sistem keuangan dapat berjalan secara optimal.¹ Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi fondasi utama bagi terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Apabila inflasi dibiarkan meningkat tanpa kendali, maka akan muncul risiko terganggunya kestabilan perekonomian dan keuangan secara lebih luas.

perekonomian nasional seharusnya berjalan dalam kerangka stabilitas yang berkesinambungan, di mana tingkat inflasi terjaga dalam rentang yang moderat agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi modern, pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan menjaga kestabilan harga barang dan jasa, melainkan merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya stabilitas sistem keuangan

¹ Arifin, Zainul. "*Kebijakan Moneter dan Inflasi di Indonesia.*" Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2021). hlm. 45.

secara menyeluruh. Otoritas moneter yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga stabilitas harga adalah Bank Indonesia. Dalam kajian ekonomi moneter, Frederic S. Mishkin menegaskan bahwa salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah pencapaian stabilitas harga, sebab tanpa kestabilan harga, mustahil sistem keuangan dapat berjalan secara efektif dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.² Dengan demikian, kestabilan harga bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi merupakan fondasi utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi makro suatu negara.

Di Indonesia, fluktuasi harga komoditas pangan masih menjadi tantangan signifikan dalam pengendalian inflasi. Berbagai faktor seperti cuaca ekstrem, gagal panen, gangguan distribusi, dan kebijakan harga energi (misalnya kenaikan BBM) memicu lonjakan harga. Salah satu contohnya terlihat pada tahun 2022 ketika pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini mendorong kenaikan inflasi nasional hingga 5,51% (yoy), yang merupakan lonjakan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Inflasi yang tinggi ini terutama berasal dari kelompok pangan seperti beras, minyak goreng, telur, dan cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan di pasar.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan inflasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan harga pasar kebutuhan pokok, berikut disajikan data inflasi nasional berdasarkan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS):

² Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 10.

Tahun	Tingkat Inflasi (yoy)
2020	1,68%
2021	1,87%
2022	5,51%
2023	$\pm 2,61\%$

Sumber data : BPS

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa laju inflasi nasional menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, inflasi relatif terkendali di angka 1,87%, mencerminkan kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pada tahun 2022 inflasi melonjak tajam akibat tekanan eksternal dan domestik. Hal ini mendorong terjadinya inflasi volatile food yang cukup tinggi dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Tahun 2023 menunjukkan tren pemulihan dengan penurunan inflasi ke angka $\pm 2,61\%$, mendekati target Bank Indonesia sebesar $3,0\% \pm 1\%$.³

Penurunan tersebut mencerminkan keberhasilan Bank Indonesia dalam merespons tekanan inflasi melalui berbagai kebijakan moneter, seperti penyesuaian BI 7-Day Reverse Repo Rate, pelaksanaan operasi pasar terbuka untuk mengatur likuiditas, serta penguatan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).⁴ Bauran kebijakan ini menunjukkan bahwa peran aktif Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat menentukan dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

³ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi 2020–2023*, Jakarta: BPS, 2024, hlm. 28.

⁴ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*, Jakarta: Bank Indonesia, 2024, hlm. 35.

Kondisi ini sejalan dengan laporan resmi Bank Indonesia yang mencatat bahwa kelompok volatile food mencatat inflasi sebesar 5,45% (yoy) pada tahun 2022, sebelum turun menjadi 2,21% (yoy) pada tahun 2023. Volatilitas harga pangan seperti beras, cabai, dan minyak goreng merupakan kontributor utama terhadap tekanan inflasi nasional. Inflasi yang tidak terkendali akan menimbulkan efek berantai, mulai dari meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga, penurunan daya beli masyarakat, hingga berpotensi memicu tekanan terhadap sistem keuangan nasional. Berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan BI No. 43 Tahun 2024, tekanan inflasi dapat memperbesar risiko kredit, khususnya dari sektor rumah tangga dan UMKM, yang tercermin dalam potensi meningkatnya Non-Performing Loan (NPL). Bahkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan melalui peningkatan suku bunga kredit konsumsi yang pada 2022 tercatat naik hingga 12,09% secara tahunan, sebelum menurun kembali di 2023. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moneter dan memperlemah fondasi sistem keuangan nasional.

Nopirin menegaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas moneter dan, dalam jangka panjang, mengganggu kestabilan perekonomian secara umum.⁵ Dengan demikian, pengendalian inflasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran penting dalam memastikan agar inflasi tetap berada dalam

⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 102.

batas yang wajar melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimilikinya, baik dalam bentuk kebijakan moneter maupun makroprudensial.

Beberapa kajian yang membahas tentang pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia telah dilakukan sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Ilyas Cahaya Mardiyanto membahas pengaruh volatilitas harga pangan terhadap inflasi nasional.⁶ Selain itu, penelitian oleh Nazly Dayanty Nasution menyoroti upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional melalui pengendalian inflasi.⁷ Sedangkan Meirawati Kusumandari lebih menitikberatkan pada pengendalian inflasi di wilayah tertentu, yaitu Solo Raya.⁸ Namun, kajian mengenai hubungan antara pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dengan stabilitas sistem keuangan nasional masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kajian pustaka yang lebih mendalam.

Dengan melihat realitas tersebut, menjadi jelas bahwa pengendalian inflasi bukan hanya sebatas menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Kenaikan harga pasar yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan pada sektor perbankan, memperbesar risiko kredit macet, dan pada akhirnya mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, baik melalui instrumen moneter seperti suku bunga acuan maupun

⁶ Ilyas Cahaya Mardiyanto, *Analisis Volatilitas Harga Pangan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Inflasi* (Skripsi, Universitas Tidar, 2023),

⁷ Nazly Dayanty Nasution, *Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi* (Skripsi Minor, UIN Sumatera Utara, 2018),

⁸ Meirawati Kusumandari, *Peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam Mengendalikan Inflasi di Solo Raya* (Tugas Akhir, Universitas Sebelas Maret, 2011),

melalui koordinasi lintas lembaga seperti TPIP dan TPID, menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Penilaian terhadap sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meredam inflasi dan menopang kestabilan sistem keuangan perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan ke depan.

Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur ekonomi moneter, khususnya yang berkaitan dengan integrasi antara kebijakan inflasi dan stabilitas keuangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan praktis bagi otoritas terkait dalam pengambilan kebijakan berbasis kajian ilmiah yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **Peran Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi Pada Harga Pasar Dan Stabilitas Sistem Keuangan.**

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada pertanyaan penelitian tentang

1. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pada harga pasar di Indonesia?
2. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pada harga pasar di Indonesia.
- b. Menganalisis peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
- c. Menjelaskan keterkaitan antara pengendalian inflasi dengan stabilitas sistem keuangan berdasarkan kajian literatur dan dokumen resmi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah dalam bidang ekonomi moneter, khususnya mengenai keterkaitan antara kebijakan pengendalian inflasi dan stabilitas sistem keuangan, melalui pendekatan studi pustaka.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dan pemangku kebijakan lainnya dalam merumuskan kebijakan moneter yang terintegrasi, guna menjaga kestabilan harga sekaligus menopang ketahanan sistem keuangan nasional.

D. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Ilyas Cahaya Mardiyanto, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Volatilitas Harga Pangan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Inflasi”, mengkaji tentang pengaruh fluktuasi harga pangan terhadap tingkat inflasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa volatilitas harga bahan pangan pokok, seperti beras, cabai merah, dan minyak goreng, memiliki peran yang signifikan terhadap terjadinya inflasi di Indonesia.⁹
2. Nazly Dayanty Nasution, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi”, membahas bagaimana kebijakan Bank Indonesia berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional melalui upaya pengendalian inflasi.¹⁰ Fokus penelitian ini lebih kepada stabilitas perekonomian secara umum, namun belum mengkaji secara mendalam keterkaitannya dengan aspek stabilitas sistem keuangan.
3. Meirawati Kusumandari, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam Mengendalikan Inflasi di Solo Raya”, lebih menitikberatkan pada pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam konteks wilayah lokal.¹¹ Penelitian ini menyoroti

⁹ Ilyas Cahaya Mardiyanto, *Analisis Volatilitas Harga Pangan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Inflasi* (Skripsi, Universitas Tidar, 2023)

¹⁰ Nazly Dayanty Nasution, *Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi* (Skripsi Minor, UIN Sumatera Utara, 2018)

¹¹ Meirawati Kusumandari, *Peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam Mengendalikan Inflasi di Solo Raya* (Tugas Akhir, Universitas Sebelas Maret, 2011)

mekanisme yang diterapkan di tingkat daerah, khususnya peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah terdapat berbagai kajian mengenai inflasi dan peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis hubungan inflasi secara umum atau dalam konteks wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian-kajian terdahulu dengan memberikan kontribusi konseptual mengenai peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi terhadap harga pasar dan implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional melalui pendekatan studi pustaka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian ini tidak menggunakan data primer dari lapangan, melainkan fokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, literatur ilmiah, jurnal akademik, dan publikasi instansi pemerintah. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif, sedangkan studi pustaka

dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.¹²

Dalam konteks ini, studi pustaka digunakan untuk memahami dan menjelaskan peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pada harga pasar dan stabilitas sistem keuangan, berdasarkan literatur dan dokumen-dokumen resmi seperti Laporan Perekonomian Indonesia, Kajian Stabilitas Keuangan, publikasi BPS, serta penelitian terdahulu yang relevan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti, kemudian menganalisis keterkaitan antara konsep atau variabel yang ada.¹³ Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisis peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi harga pasar dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, berdasarkan literatur, data sekunder, serta dokumen resmi yang relevan.

Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi atau kondisi berdasarkan data dan teori yang ada, sementara sifat analitis digunakan untuk menghubungkan antarvariabel dan menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran logis dan sistematis, sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian studi pustaka.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 9–11.

¹³ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 63.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Dokumen resmi dari Bank Indonesia, seperti Laporan Perekonomian Indonesia, Kajian Stabilitas Keuangan, dan publikasi kebijakan moneter.
- b. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), seperti data inflasi tahunan, indeks harga konsumen, dan data volatile food.
- c. Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas topik inflasi, stabilitas sistem keuangan, dan peran Bank Indonesia.
- d. Buku-buku teori ekonomi moneter, seperti karya Frederic S. Mishkin dan Nopirin, yang dijadikan sebagai dasar teoritis..¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang merupakan bagian dari pendekatan studi pustaka (library research). Teknik ini dipilih karena fokus penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan, melainkan bertumpu pada penelaahan literatur dan sumber data yang telah tersedia dan diakui validitasnya secara ilmiah.¹⁵

¹⁴ Zed, M. *Literature Searching: Langkah-langkah Praktis Pencarian Data dan Informasi Ilmiah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), (2004). hlm. 19.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber resmi dan terpercaya seperti buku akademik, jurnal ilmiah, laporan tahunan Bank Indonesia, dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS), serta Undang-Undang yang relevan seperti UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sumber-sumber ini memberikan kerangka konseptual dan data faktual mengenai inflasi, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan dalam konteks peran Bank Indonesia.

Dengan mengandalkan teknik ini, penelitian berupaya mengonstruksi argumen yang kuat dan terverifikasi secara akademik, serta mendukung objektivitas dalam menganalisis peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi harga pasar dan stabilitas sistem keuangan nasional.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi relasional. Analisis isi relasional merupakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menggali hubungan antar konsep atau variabel yang terdapat dalam suatu dokumen atau teks. Teknik ini tidak hanya mengidentifikasi isi dari suatu dokumen, tetapi juga menelaah keterkaitan antar elemen, seperti hubungan antara inflasi, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis isi dari berbagai laporan dan literatur, kemudian mengaitkannya untuk menjawab dua fokus utama:

(1) bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi harga pasar, dan

(2) bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Mankiw inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian.¹ Hal ini berarti bahwa inflasi tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga satu atau dua komoditas saja, melainkan mencakup keseluruhan barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian.

Selaras dengan itu, Nopirin menyatakan bahwa inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum yang bersifat kontinyu dan saling memengaruhi satu sama lain. Jika kenaikan harga bersifat sementara dan hanya terbatas pada komoditas tertentu, maka kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai inflasi.²

Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika domestik, tetapi juga oleh faktor eksternal. Dalam perekonomian terbuka, fluktuasi harga di pasar global dapat berdampak terhadap stabilitas harga dalam negeri, terutama untuk negara berkembang yang sebagian besar bahan baku produksinya masih bergantung pada impor. Mishkin menjelaskan bahwa salah satu

¹ N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, 8th ed. (New York: Worth Publishers, 2012), hlm. 85.

² Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 25

sumber inflasi di negara berkembang adalah imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang-barang impor, termasuk energi dan pangan.³ Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak semata bergantung pada instrumen kebijakan domestik, tetapi juga perlu mempertimbangkan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasokan.

Kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat laju inflasi. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga barang impor akan mengalami peningkatan, sehingga memicu kenaikan harga barang-barang konsumsi di dalam negeri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, ditemukan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah secara signifikan mendorong terjadinya inflasi melalui transmisi harga barang impor.⁴ Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi di Indonesia harus mempertimbangkan faktor stabilitas nilai tukar sebagai bagian dari kerangka kebijakan makroekonomi yang komprehensif.

Di Indonesia, salah satu faktor pendorong inflasi yang kerap terjadi setiap tahunnya adalah inflasi musiman. Inflasi jenis ini biasanya terjadi menjelang perayaan hari besar keagamaan, seperti Idulfitri dan Natal, di mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok meningkat tajam. Selain itu, fenomena cuaca ekstrem dan gangguan produksi sektor pertanian juga sering kali menyebabkan kenaikan harga pangan. Data Badan Pusat

³ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 341.

⁴ Rahmawati, D., et al., "The Impact of Exchange Rate Volatility on Inflation in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol. 8 No. 1 (2023): 45.

Statistik (BPS) menunjukkan bahwa komponen makanan memiliki kontribusi terbesar terhadap inflasi tahunan Indonesia, khususnya pada periode-periode tersebut.⁵ Oleh sebab itu, upaya pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan, memerlukan perhatian serius dari otoritas moneter dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam konteks pengendalian inflasi, penting untuk memahami bahwa stabilitas harga memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat memicu ketidakpastian dalam dunia usaha dan pasar keuangan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan instabilitas sistemik. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan Bank Indonesia, stabilitas harga merupakan salah satu prasyarat utama bagi terciptanya sistem keuangan yang sehat, berdaya tahan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁶ Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

2. Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan faktor penyebabnya. Menurut Rahardja dan Manurung, inflasi dibedakan menjadi tiga jenis utama:

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik, Inflasi Desember 2023, (Jakarta: BPS, 2024),

⁶ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 47.

- a. Pertama, *demand-pull inflation* yaitu inflasi yang terjadi karena adanya peningkatan permintaan agregat terhadap barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi. Inflasi jenis ini sering terjadi pada saat perekonomian tumbuh pesat atau menjelang momen-momen khusus seperti hari besar keagamaan, ketika permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok melonjak.
- b. Kedua, *cost-push inflation* yaitu inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, energi, atau upah buruh. Inflasi jenis ini lebih sulit dikendalikan melalui kebijakan moneter karena berasal dari sisi penawaran.
- c. Ketiga, *bottleneck inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh hambatan dalam proses distribusi barang atau kelangkaan bahan baku di pasar, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang bersifat mendadak pada sektor-sektor tertentu.⁷

Selain diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, inflasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya:

- a. Menurut Mishkin, inflasi ringan terjadi apabila tingkat inflasi berada di bawah 10 % per tahun dan masih dianggap wajar untuk mendukung aktivitas ekonomi.
- b. Inflasi sedang berada dalam rentang 10 % hingga 30 % per tahun,
- c. Inflasi berat berada antara 30 % hingga 100 % per tahun.

⁷ Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2008), hlm. 271

- d. Kondisi paling ekstrem disebut hiperinflasi, yaitu inflasi dengan laju di atas 100 % per tahun. Fenomena hiperinflasi sering kali terjadi di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi, seperti yang pernah terjadi di Zimbabwe dan Venezuela. Inflasi yang tidak terkendali akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk menurunkan daya beli masyarakat, memperbesar risiko ketidakstabilan sistem keuangan, dan mengancam kepercayaan publik terhadap sistem moneter yang berlaku.⁸

3. Penyebab Terjadinya Inflasi

Secara umum, penyebab inflasi dapat dibagi menjadi dua faktor besar, yaitu dari sisi permintaan (*demand side*) dan dari sisi penawaran (*supply side*). Mishkin menjelaskan bahwa :

- a. inflasi dari sisi permintaan terjadi ketika jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas produksi yang ada.⁹ Situasi ini mendorong kenaikan harga secara menyeluruh karena produsen tidak mampu memenuhi permintaan yang berlebihan tersebut. Inflasi jenis ini sering kali muncul dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketika pendapatan masyarakat meningkat sehingga daya beli juga mengalami lonjakan. Di Indonesia, *demand-pull inflation* sering terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti Idulfitri dan Natal, ketika permintaan terhadap kebutuhan pokok dan barang konsumsi meningkat signifikan.

⁸ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 60.

⁹ *Ibid.*, hal 58

- b. Di sisi lain, inflasi dari sisi penawaran (*supply side inflation*) disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, baik karena naiknya harga bahan baku, energi, atau upah tenaga kerja. Ketika produsen menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, mereka akan meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih mahal. Salah satu contoh nyata dari inflasi jenis ini terjadi pada tahun 2022, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya distribusi berbagai kebutuhan pokok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga BBM menjadi salah satu penyebab utama lonjakan inflasi Indonesia pada tahun tersebut, dengan tingkat inflasi tahunan mencapai 5,51 persen (yoy).¹⁰ Hal ini memperlihatkan bagaimana inflasi dari sisi penawaran dapat memberikan tekanan besar terhadap harga barang konsumsi masyarakat.

Selain kedua faktor utama tersebut, inflasi di Indonesia juga sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti inefisiensi distribusi barang dan ketergantungan terhadap impor bahan baku tertentu. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga pangan dan energi di pasar internasional juga berperan mempercepat laju inflasi domestik. Fenomena *imported inflation* atau inflasi yang bersumber dari kenaikan harga barang impor

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Berita Resmi Statistik, Inflasi Desember 2022* (Jakarta: BPS, 2023)

sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang seperti Indonesia.¹¹

Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia tidak hanya sebatas menyesuaikan suku bunga acuan, tetapi juga perlu bersinergi dengan kebijakan fiskal dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar agar dapat mengatasi tekanan inflasi secara menyeluruh.

4. Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap perekonomian dan masyarakat sangat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun stabilitas keuangan. Dalam pandangan Gregory Mankiw, inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli uang, sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dengan pendapatan tetap menjadi kelompok yang paling terdampak karena penghasilan mereka tidak mengalami penyesuaian seiring dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.¹²

Menurut Dornbusch, Fischer, dan Startz, salah satu dampak signifikan dari inflasi adalah terjadinya distorsi harga relatif, yang menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak efisien.¹³ Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

¹¹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 341.

¹² N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, 7th ed. (New York: Worth Publishers, 2009), hlm. 89–90.

¹³ R. Dornbusch, S. Fischer, & R. Startz, *Macroeconomics*, 11th ed. (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 415.

Dampak lainnya adalah meningkatnya biaya transaksi karena masyarakat dan pelaku usaha harus terus menyesuaikan harga, mempercepat perputaran uang tunai, dan meningkatkan biaya administrasi perusahaan.

Dalam perspektif negara berkembang, Pangiuk menjelaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali akan memperparah ketimpangan distribusi pendapatan.¹⁴ Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan dampak inflasi lebih berat dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Akibatnya, inflasi bisa memicu persoalan sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya daya beli kelompok rentan, dan bertambahnya angka pengangguran karena melemahnya aktivitas produksi dan perdagangan.

Inflasi memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi, baik bagi individu, pelaku usaha, maupun stabilitas makroekonomi suatu negara. Dari sisi konsumen, inflasi yang tinggi akan menggerus daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Akibatnya, standar hidup masyarakat menurun, terutama bagi golongan berpenghasilan tetap. Dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkendali juga dapat memperlebar kesenjangan sosial, karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih terdampak dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang memiliki aset produktif. Inflasi yang tinggi juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas perekonomian, baik di

¹⁴ Pangiuk, Ambok, *Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Kontekstualita Press, 2013), hlm. 137.

sektor produksi maupun konsumsi, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, inflasi memberikan dampak serius terhadap stabilitas sektor keuangan. Ketika inflasi berada pada tingkat yang tidak terkendali, perbankan dan lembaga keuangan menghadapi risiko penurunan kualitas kredit akibat menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Wulandari dkk menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi cenderung meningkatkan risiko ketidakstabilan sektor perbankan melalui fluktuasi tingkat suku bunga dan pelemahan kualitas kredit.¹⁵ Gejolak inflasi juga dapat mempengaruhi pasar obligasi dan menimbulkan volatilitas di pasar modal. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi tanggung jawab utama otoritas moneter agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Seperti ditegaskan oleh Bank Indonesia, stabilitas harga merupakan prasyarat utama bagi terciptanya sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.¹⁶

5. Inflasi dalam Konteks Kebijakan Moneter

Pengendalian inflasi merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter oleh otoritas moneter di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari sisi harga barang dan jasa maupun dari sisi nilai tukar mata uang. Tugas tersebut ditegaskan

¹⁵ Ika Wulandari & Harianto, “Inflasi, Stabilitas Harga, dan Pengaruhnya terhadap Sektor Keuangan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol. 15 No. 2 (2022): 177.

¹⁶ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 47.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan sejumlah instrumen kebijakan moneter, salah satunya adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate, yang berfungsi sebagai suku bunga acuan dalam pengaturan likuiditas perekonomian. Selain itu, instrumen lain yang digunakan meliputi operasi pasar terbuka, pengaturan giro wajib minimum, dan intervensi di pasar valuta asing.

Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan *inflation targeting framework* (ITF), di mana pengendalian inflasi dilakukan secara terukur dengan menetapkan target inflasi tahunan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Dalam kerangka ini, koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal menjadi sangat penting agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif. Mishkin menegaskan bahwa kerangka kebijakan ITF bertujuan untuk meningkatkan transparansi kebijakan moneter sekaligus memperkuat akuntabilitas bank sentral dalam menjaga stabilitas harga.¹⁸ Dengan penerapan kerangka ini, Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada stabilitas harga barang dan jasa, tetapi juga menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap terkendali melalui komunikasi kebijakan yang efektif.

Pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Inflasi yang terjaga

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Pasal 7.

¹⁸ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 435.

dalam batas wajar menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha dan sektor perbankan. Menurut laporan Bank Indonesia, stabilitas harga merupakan salah satu fondasi penting bagi terjaganya stabilitas sistem keuangan.¹⁹ Ketika inflasi berada dalam target yang ditetapkan, dunia usaha dapat merencanakan investasi dengan lebih baik, sektor perbankan dapat menyalurkan kredit dengan risiko yang lebih terkendali, dan masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap nilai mata uang. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.

Dengan memahami dinamika inflasi secara menyeluruh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia tidak hanya penting secara teoritis, namun juga memiliki dampak nyata terhadap kestabilan harga pasar dan kesehatan sistem keuangan nasional. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, kebijakan moneter Bank Indonesia juga harus responsif terhadap dinamika eksternal. Ketika terjadi tekanan inflasi global akibat krisis energi, gangguan rantai pasok, atau konflik geopolitik, Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank sentral dalam melakukan antisipasi dan penyesuaian

¹⁹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 47

kebijakan secara adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Penambahan fleksibilitas dalam penyesuaian suku bunga acuan, serta intensifikasi komunikasi publik mengenai arah kebijakan, menjadi faktor penting dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap positif.

Dengan demikian, inflasi dalam konteks kebijakan moneter tidak hanya menjadi persoalan teknis pengendalian harga, tetapi merupakan bagian dari strategi makroekonomi yang lebih luas. Peran aktif Bank Indonesia dalam menerapkan instrumen moneter secara konsisten dan terukur menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Stabilitas Sistem Keuangan

1. Pengertian Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang stabil memungkinkan berjalannya fungsi intermediasi keuangan secara efektif, baik dalam hal penghimpunan dana masyarakat maupun penyalurannya kepada sektor-sektor produktif. Menurut Mishkin, stabilitas keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya dalam menyalurkan dana, mengelola risiko, dan memfasilitasi transaksi secara efektif, bahkan ketika menghadapi gejolak internal maupun eksternal.²⁰ Dengan kata lain, stabilitas keuangan dapat

²⁰ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 503.

diartikan sebagai kemampuan sistem keuangan dalam menghadapi tekanan dan gangguan yang dapat mengancam kelangsungan fungsinya dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, pengertian stabilitas sistem keuangan dijelaskan lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai kondisi di mana sistem keuangan nasional dapat menyerap berbagai guncangan, baik yang berasal dari domestik maupun global, tanpa menimbulkan disfungsi pada sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor riil.²¹ Stabilitas sistem keuangan juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap potensi krisis ekonomi, sehingga menjadi perhatian utama bagi otoritas moneter dan fiskal dalam merancang kebijakan ekonomi.

2. Faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utamanya adalah tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat memicu ketidakpastian dalam dunia usaha dan sektor keuangan. Ketidakstabilan harga dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi, meningkatkan risiko kredit macet di sektor perbankan, dan memicu volatilitas pasar keuangan. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga global, dan gejolak harga komoditas internasional juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.²²

²¹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 49.

²² Ika Wulandari & Harianto, "Inflasi, Stabilitas Harga, dan Pengaruhnya terhadap Sektor Keuangan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol. 15 No. 2 (2022): 177.

Faktor lainnya yang turut berpengaruh adalah kondisi fundamental perekonomian nasional, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, defisit fiskal, serta struktur permodalan perbankan. Sistem keuangan yang stabil ditandai dengan tingkat permodalan yang memadai, kualitas aset yang sehat, serta manajemen risiko yang baik di sektor perbankan. Oleh karena itu, penguatan stabilitas sistem keuangan tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter semata, melainkan juga memerlukan sinergi kebijakan antara otoritas moneter dan otoritas fiskal.

3. Hubungan Inflasi dengan Stabilitas Sistem Keuangan

Hubungan antara inflasi dan stabilitas sistem keuangan bersifat erat dan saling mempengaruhi. Inflasi yang tinggi akan menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan ketidakpastian dalam aktivitas bisnis. Di sektor perbankan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kredit macet karena menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Wulandari & Harianto menjelaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali akan memperbesar potensi risiko sistemik di sektor keuangan melalui fluktuasi suku bunga dan penurunan kualitas aset perbankan.²³ Sebaliknya, inflasi yang terjaga dalam kisaran yang stabil akan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan, sehingga mendorong kelancaran intermediasi keuangan.²⁴

Dalam kerangka kebijakan moneter Indonesia, pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga

²³ *Ibid.*,

²⁴ Wulandari, N., & Harianto, S. (2021). *Inflasi dan Risiko Sistemik Keuangan: Pendekatan Teori Makroprudensial*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(1), hlm. 45.

merupakan bagian integral dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia memandang bahwa kebijakan moneter yang efektif dalam menjaga stabilitas harga merupakan salah satu fondasi utama bagi sistem keuangan yang sehat.²⁵ Dengan demikian, inflasi dan stabilitas sistem keuangan memiliki hubungan yang erat dan saling menentukan, sehingga pengendalian inflasi merupakan instrumen strategis dalam menciptakan perekonomian yang tangguh.

4. Risiko Sistemik dalam Sistem Keuangan

Risiko sistemik merupakan salah satu isu krusial dalam kajian stabilitas sistem keuangan. Istilah ini merujuk pada potensi gangguan yang dapat menyebabkan kegagalan sistem keuangan secara keseluruhan, bukan hanya pada satu lembaga atau sektor tertentu. Menurut Bank Indonesia dalam Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 Tahun 2024, risiko sistemik didefinisikan sebagai “potensi gangguan yang serius terhadap fungsi sistem keuangan secara luas, yang ditimbulkan oleh kegagalan satu atau lebih lembaga keuangan, infrastruktur pasar, atau pasar keuangan yang dapat menyebar ke seluruh sistem dan menurunkan kepercayaan publik secara signifikan.”²⁶

Risiko sistemik dapat muncul dari berbagai sumber, antara lain tekanan inflasi yang tinggi, lonjakan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), gejolak nilai tukar, serta penurunan tajam pada pasar keuangan. Ketika satu sektor terguncang, dampaknya dapat menyebar ke

²⁵ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*, hlm. 50.

²⁶ Bank Indonesia. *Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 Tahun 2024*, hlm. 14.

sektor lain melalui keterkaitan antar lembaga keuangan, jaringan pasar, dan arus likuiditas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan memiliki karakteristik saling keterkaitan (*interconnectedness*) dan rentan terhadap penularan risiko (*contagion*).²⁷

Dalam konteks inflasi, risiko sistemik dapat muncul akibat meningkatnya beban pengeluaran masyarakat yang kemudian menurunkan kemampuan membayar cicilan kredit. Hal ini berdampak pada kualitas aset bank dan dapat memicu ketegangan dalam sistem keuangan. Ketika rasio kredit bermasalah meningkat, kepercayaan investor dan depositan dapat terganggu, yang pada akhirnya melemahkan fungsi intermediasi perbankan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi yang efektif bukan hanya untuk menjaga kestabilan harga, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mencegah potensi risiko sistemik.²⁸

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengawas makroprudensial memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi dan mengelola risiko sistemik melalui instrumen kebijakan moneter, makroprudensial, serta koordinasi lintas lembaga. Upaya pencegahan terhadap risiko sistemik menjadi semakin penting dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, terutama ketika tekanan harga dan ketidakpastian pasar meningkat secara bersamaan.

Dengan demikian, risiko sistemik merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan stabilitas sistem keuangan. Relasi

²⁷ Bank Indonesia. *Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 Tahun 2024*, hlm. 14–15.

²⁸ Bank Indonesia. *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan No. 43 Tahun 2024*, hlm. 21–22

antara variabel inflasi, daya beli, kualitas kredit, dan stabilitas sistem keuangan membentuk struktur analisis yang mendasari peran Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan makroekonomi nasional. Memahami risiko sistemik menjadi kunci dalam mengevaluasi peran kebijakan yang bersifat antisipatif dan responsif terhadap guncangan ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun global.²⁹

C. Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi

1. Pengertian dan Fungsi Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan lembaga bank sentral Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.³⁰ Kestabilan nilai rupiah mencakup dua aspek utama, yaitu stabilitas harga barang dan jasa (inflasi) serta stabilitas nilai tukar terhadap mata uang asing. Dalam menjalankan peran tersebut, Bank Indonesia diberikan independensi penuh dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa campur tangan pihak lain.

Menurut Mishkin, bank sentral memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai otoritas yang bertugas menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan sebagai *lender of last resort* dalam kondisi krisis

²⁹ Wardhono, Adhitya, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi, 2019.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 7.

keuangan.³¹ Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia menjalankan fungsi tersebut melalui pengelolaan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Dengan posisi tersebut, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimilikinya.

2. Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang berorientasi pada pencapaian target inflasi tahunan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate, yaitu suku bunga acuan yang menjadi referensi bagi aktivitas perekonomian, termasuk sektor perbankan dan pasar uang. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan operasi pasar terbuka, pengaturan giro wajib minimum perbankan, serta intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar.³²

Dalam kerangka kebijakan moneter modern, Bank Indonesia menerapkan *inflation targeting framework* (ITF) sejak tahun 2005. Dalam kerangka ini, Bank Indonesia menetapkan target inflasi yang diumumkan kepada publik dan berupaya menjaga agar tingkat inflasi tahunan tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penerapan kerangka ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter,

³¹ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 439.

³² Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 450.

sekaligus menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap terkendali. Hal ini penting agar kebijakan moneter dapat berjalan secara efektif dan menciptakan kepastian di sektor keuangan maupun dunia usaha.³³

3. Strategi Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi

Dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi, Bank Indonesia menerapkan strategi yang sistematis melalui kerangka *inflation targeting framework* (ITF). Strategi ini mulai diterapkan secara resmi sejak tahun 2005 sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga. Melalui kerangka ITF, Bank Indonesia menetapkan target inflasi tahunan yang diumumkan kepada publik secara terbuka. Dengan adanya target inflasi tersebut, Bank Indonesia memiliki acuan yang jelas dalam menentukan arah kebijakan suku bunga dan instrumen moneter lainnya. Salah satu tujuan utama penerapan ITF adalah agar kebijakan moneter menjadi lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Mishkin menjelaskan bahwa ITF merupakan pendekatan kebijakan moneter modern yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dengan menargetkan tingkat inflasi secara eksplisit.³⁴

Keberhasilan implementasi ITF sangat bergantung pada efektivitas komunikasi kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, Bank Indonesia secara aktif menyampaikan proyeksi inflasi, pertimbangan kebijakan suku bunga, dan kondisi perekonomian global maupun domestik. Komunikasi yang jelas bertujuan untuk membentuk

³³ *Ibid.*, hlm. 441

³⁴ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 441–443.

ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap terkendali. Ekspektasi inflasi yang stabil sangat penting karena akan mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi masyarakat. Jika masyarakat yakin bahwa inflasi akan tetap terkendali sesuai target, maka kecenderungan untuk menaikkan harga barang secara spekulatif akan menurun. Dengan demikian, komunikasi kebijakan menjadi instrumen pendukung yang krusial dalam pelaksanaan ITF.

Selain aspek komunikasi, strategi pengendalian inflasi melalui ITF juga diperkuat dengan koordinasi lintas lembaga, khususnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Melalui TPIP dan TPID, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya harga-harga komoditas pangan strategis. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi inflasi musiman yang sering terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan atau akibat gangguan distribusi barang. Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bank Indonesia menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian harga di tingkat daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga nasional.³⁵ Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kerangka ITF tidak hanya berfokus pada aspek makroekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sektoral dan regional secara terintegrasi.

³⁵ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 46–48.

4. Peran BI terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional. Inflasi yang terkendali dalam batas wajar menjadi salah satu prasyarat utama bagi terciptanya kepastian ekonomi, baik bagi dunia usaha maupun lembaga keuangan. Stabilitas harga menciptakan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi, sementara bagi perbankan, kondisi tersebut memperkecil risiko gagal bayar kredit akibat tekanan inflasi yang tinggi. Dalam Laporan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan fondasi utama bagi terjaganya stabilitas sistem keuangan karena inflasi yang rendah akan menciptakan ekspektasi ekonomi yang positif.³⁶ Dengan demikian, peran Bank Indonesia tidak sebatas mengatur kestabilan harga, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan kondisi keuangan yang sehat.

Hubungan antara inflasi dan stabilitas sistem keuangan juga sangat erat dalam konteks transmisi kebijakan moneter. Ketika inflasi terkendali, tingkat suku bunga dapat diatur secara lebih optimal sehingga mendukung intermediasi keuangan di sektor perbankan. Sebaliknya, inflasi yang tinggi mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga acuan guna menahan tekanan harga, namun kebijakan tersebut berisiko memperlambat pertumbuhan kredit dan investasi. Seperti yang dijelaskan oleh Mishkin, salah satu risiko utama dari inflasi yang tinggi adalah terjadinya distorsi

³⁶ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 50.

dalam pasar keuangan, termasuk meningkatnya volatilitas suku bunga dan melemahnya fungsi intermediasi perbankan.³⁷ Oleh karena itu, menjaga kestabilan inflasi menjadi langkah preventif agar tidak terjadi disrupsi dalam sistem keuangan nasional.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi yang stabil memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional. Inflasi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang, memperkecil ketidakpastian dalam transaksi keuangan, serta menciptakan ruang yang lebih luas bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang efektif. Dalam konteks global, stabilitas harga domestik juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal, seperti fluktuasi harga energi dunia atau ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Oleh karena itu, keberhasilan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi memiliki dimensi strategis, tidak hanya dalam menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga dalam membangun fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.³⁸

D. Teori-Teori yang Relevan

Sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini, kerangka teori memiliki peran penting untuk menjelaskan hubungan antara peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Kajian teoritis

³⁷ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 465.

³⁸ Wardhono, Adhitya, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi, 2019.

ini disusun untuk memberikan landasan ilmiah yang sistematis agar analisis dalam penelitian dapat dilakukan secara terarah. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu grand theory, middle range theory, dan applied theory, sesuai pendekatan dalam penelitian berbasis studi pustaka. Pemilahan teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dari tataran konseptual hingga aplikatif, sehingga dapat memperkuat relevansi kajian dengan fenomena yang diteliti.

1. Grand Theory: Teori Inflasi

Sebagai landasan utama, penelitian ini menggunakan teori inflasi dalam kajian ekonomi makro. Menurut Mankiw, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian.³⁹ Inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ketika permintaan agregat melebihi kapasitas produksi suatu negara, maka harga-harga akan cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh rumah tangga, pelaku usaha, maupun otoritas kebijakan.

Selain itu, teori inflasi yang dikemukakan oleh Nopirin juga memberikan kontribusi penting terhadap kerangka pikir penelitian ini. Ia menyatakan bahwa inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga

³⁹ N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, 8th ed. (New York: Worth Publishers, 2012), hlm. 85.

secara umum dan berkelanjutan yang dapat mengurangi daya beli uang.⁴⁰ Konsep ini menekankan bahwa inflasi bukanlah gejala sesaat, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang perlu diwaspadai oleh otoritas moneter. Dalam konteks Indonesia, gejala inflasi sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti tingginya biaya distribusi dan ketergantungan terhadap impor barang pokok.

Teori inflasi memberikan landasan kuat untuk memahami hubungan antara stabilitas harga dan keseimbangan makroekonomi. Inflasi yang terjaga pada tingkat moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan berisiko menciptakan ketidakstabilan keuangan. Oleh karena itu, teori inflasi menjadi pondasi bagi penelitian ini dalam menjelaskan urgensi pengendalian inflasi oleh otoritas moneter. Pemahaman yang mendalam tentang konsep inflasi juga menjadi bekal penting untuk menganalisis implikasi kebijakan Bank Indonesia terhadap kondisi keuangan nasional.

Dengan demikian, grand theory dalam penelitian ini digunakan untuk menegaskan pentingnya stabilitas harga dalam kerangka kebijakan makroekonomi, yang secara langsung berkaitan dengan tujuan utama penelitian ini, yaitu mengkaji peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga untuk mendukung sistem keuangan yang sehat dan berdaya tahan.

⁴⁰ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 25.

2. Middle Range Theory: Teori Kebijakan Moneter

Untuk menjembatani antara konsep inflasi dengan strategi kebijakan moneter, penelitian ini menggunakan teori kebijakan moneter yang dikembangkan oleh Frederic S. Mishkin. Mishkin menjelaskan bahwa kebijakan moneter adalah proses pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral untuk mencapai tujuan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan.⁴¹ Dalam kerangka kebijakan ini, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola berbagai instrumen kebijakan moneter guna memastikan agar inflasi terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penerapan kebijakan moneter di Indonesia diformulasikan dalam kerangka *inflation targeting framework* (ITF). ITF merupakan pendekatan modern dalam pengendalian inflasi, di mana bank sentral menetapkan target inflasi yang bersifat eksplisit dan transparan kepada publik. Dengan adanya target inflasi tersebut, arah kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas menjadi lebih terarah, dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap otoritas moneter. Dalam laporan Bank Indonesia, diterangkan bahwa ITF bertujuan untuk menjaga agar ekspektasi inflasi masyarakat tetap stabil, sehingga perilaku konsumsi dan investasi dapat berlangsung dalam kondisi yang lebih pasti.⁴²

⁴¹ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 60.

⁴² Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm. 46–48.

Kerangka ITF tidak hanya menekankan pada penggunaan instrumen kebijakan suku bunga, tetapi juga menuntut keterbukaan komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kredibilitas otoritas moneter dalam upaya mengendalikan inflasi. Ketika ekspektasi inflasi dapat dikendalikan melalui komunikasi yang baik, maka volatilitas harga barang dan jasa dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, middle range theory dalam penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan moneter merupakan instrumen strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga.

Dengan kerangka teori ini, penelitian akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dapat mempengaruhi laju inflasi dan, pada akhirnya, berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

3. Applied Theory: Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk memperkuat relevansi kajian penelitian, teori terapan mengenai stabilitas sistem keuangan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis implikasi kebijakan moneter terhadap sektor keuangan. Mishkin menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan dapat menjalankan fungsi intermediasi, mengelola risiko, dan memfasilitasi transaksi keuangan tanpa mengalami gangguan yang signifikan.⁴³ Stabilitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga. Ketika inflasi dapat dikendalikan, pelaku usaha dan

⁴³ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, hlm. 503.

lembaga keuangan memiliki keyakinan yang lebih tinggi dalam menjalankan aktivitas perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, stabilitas sistem keuangan menjadi perhatian serius bagi Bank Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Perekonomian Indonesia, stabilitas harga merupakan salah satu fondasi utama bagi terjaganya stabilitas sistem keuangan nasional.⁴⁴ Stabilitas harga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk melakukan perencanaan investasi secara lebih baik, serta memperkuat ketahanan sektor perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor produktif. Hubungan erat antara inflasi dan stabilitas sistem keuangan ini menjadi salah satu alasan utama perlunya kebijakan moneter yang konsisten dan efektif.

Stabilitas sistem keuangan juga berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap potensi krisis ekonomi. Ketika sistem keuangan nasional berada dalam kondisi yang stabil, dampak dari gejolak eksternal seperti fluktuasi harga energi global atau ketegangan geopolitik internasional dapat diminimalkan. Oleh karena itu, keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga inflasi merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan ketahanan perekonomian nasional secara menyeluruh.

Dengan menggunakan applied theory ini, penelitian akan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana keterkaitan antara kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan stabilitas sistem

⁴⁴ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia* 2023, hlm. 50

keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik di bidang ekonomi moneter dan kebijakan publik.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logis hubungan antara teori-teori yang telah dikaji dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penyusunan kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam proses analisis agar tidak keluar dari pokok kajian yang telah dirumuskan. Dalam konteks penelitian studi pustaka, kerangka berpikir berfungsi untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep yang telah dipaparkan dalam kajian teori dapat digunakan untuk menjawab fokus penelitian.

Fenomena yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah terjadinya inflasi di Indonesia, khususnya inflasi yang bersumber dari fluktuasi harga kebutuhan pokok dan energi. Inflasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan makroekonomi, termasuk terganggunya stabilitas sistem keuangan nasional.⁴⁵ Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mengendalikan inflasi agar dampaknya terhadap sistem keuangan dapat diminimalisasi. Pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter yang tertuang dalam kerangka strategi *inflation targeting*

⁴⁵ Bank Indonesia, *Inflation Targeting Framework: Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2022, hlm. 10.

framework (ITF), yang bertujuan untuk menjaga agar inflasi tetap berada dalam kisaran target yang ditetapkan.⁴⁶

Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan aspek moneter, tetapi juga memerlukan sinergi kebijakan antar lembaga melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya mengantisipasi faktor-faktor penyebab inflasi, khususnya dari sektor pangan yang sering menjadi sumber inflasi musiman di Indonesia. Dalam kerangka ini, stabilitas harga dipandang sebagai fondasi utama bagi terciptanya stabilitas sistem keuangan. Inflasi yang terkendali akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang, memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan, serta mendukung perencanaan investasi dunia usaha.

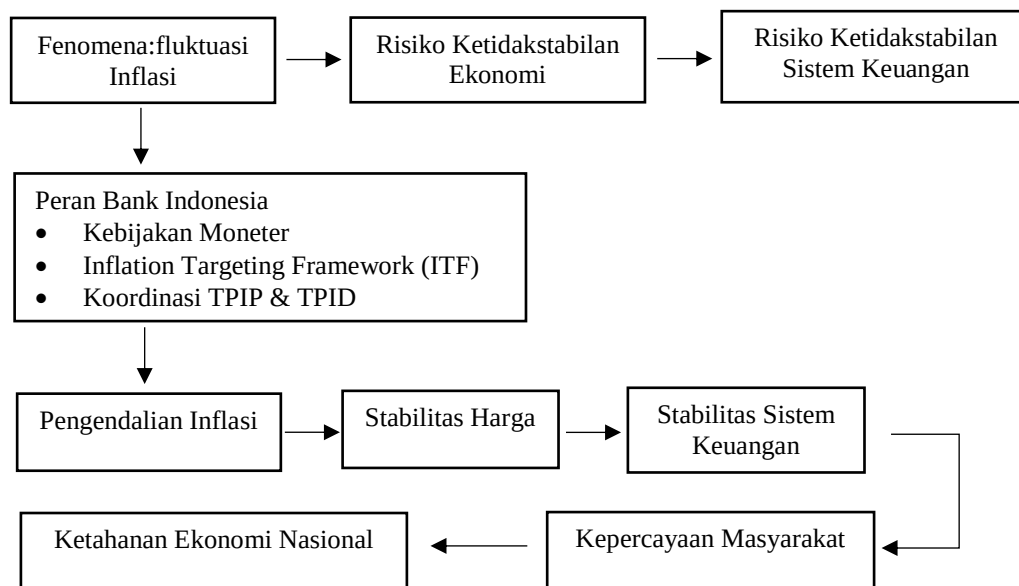
Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara konsep inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan harga melalui penerapan kebijakan moneter berbasis ITF. Inflasi yang terkendali akan menciptakan stabilitas sistem keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Berikut ini Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran hubungan logis antara fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia dengan upaya pengendaliannya oleh Bank Indonesia, serta

⁴⁶ Mishkin, Frederic S., *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 10th ed., New York: Pearson, 2016, hlm. 517–519.

implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan integrasi antara kajian teori, temuan studi sebelumnya, serta kondisi empiris yang relevan.

Diagram Kerangka Berpikir:



Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun untuk menggambarkan keterkaitan logis antara fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia dengan peran Bank Indonesia dalam pengendaliannya, serta dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, sehingga alur berpikir dikembangkan berdasarkan integrasi antara teori-teori relevan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta kondisi empiris terkini.

Fenomena utama yang menjadi perhatian adalah fluktuasi inflasi harga pasar, terutama yang dipicu oleh lonjakan harga pangan dan energi dalam lima tahun terakhir. Ketidakstabilan harga tersebut berpotensi menimbulkan risiko

terhadap kestabilan sistem keuangan, seperti meningkatnya suku bunga kredit, menurunnya daya beli masyarakat, hingga terganggunya aktivitas intermediasi sektor perbankan.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran strategis. Melalui kerangka kerja *Inflation Targeting Framework* (ITF), Bank Indonesia menetapkan target inflasi tahunan dan mengatur suku bunga acuan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga. Di sisi lain, Bank Indonesia juga bersinergi dengan lembaga lain dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, khususnya pada saat gejolak harga terjadi.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk mencapai pengendalian inflasi yang efektif, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas harga. Stabilitas harga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang dan kebijakan ekonomi negara. Kepercayaan tersebut sangat penting untuk memperkuat fungsi sektor keuangan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menekankan bahwa pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia tidak hanya berdampak pada kestabilan harga semata, tetapi juga berperan dalam membangun stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Pemahaman konseptual ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu, baik dari jurnal maupun buku dalam lima tahun terakhir, dengan kondisi aktual

yang terjadi, sehingga menghasilkan kajian yang relevan dan aktual sesuai konteks Indonesia saat ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi Harga Pasar

Pengendalian inflasi harga pasar merupakan bagian integral dari fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjaga kestabilan nilai rupiah menjadi tujuan utama BI, yang dijalankan melalui kebijakan moneter termasuk pengendalian inflasi.¹ Dalam konteks studi pustaka ini, peran Bank Indonesia dianalisis melalui pendekatan analisis isi relasional, dengan membandingkan teori, kebijakan aktual, serta literatur ilmiah terkait. Subbab ini akan dibagi ke dalam beberapa subjudul kecil guna memperjelas peran Bank Indonesia secara konseptual dan empiris dalam mengendalikan inflasi harga pasar.

1. Mandat Konstitusional dan Tanggung Jawab Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan harga melalui kebijakan moneter yang bersifat independen. Stabilitas harga ini menjadi syarat utama bagi kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Mishkin menyatakan bahwa salah satu fondasi sistem keuangan yang kuat adalah kestabilan harga yang dijaga oleh otoritas moneter yang kredibel.² Hal ini diperkuat oleh Septiani dalam penelitiannya yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 7.

² Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 10th Edition (New York: Pearson Education, 2016), hlm. 389.

menyoroti pentingnya komitmen bank sentral terhadap sasaran inflasi sebagai wujud akuntabilitas dan profesionalisme lembaga moneter.³

Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia diberi wewenang konstitusional untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter secara mandiri. Dalam hal ini, BI memiliki tanggung jawab langsung terhadap kestabilan harga barang dan jasa di pasar. Stabilitas ini tidak hanya mencerminkan daya beli masyarakat, tetapi juga memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia umumnya dilakukan melalui penyesuaian instrumen moneter, seperti pengaturan jumlah uang beredar dan pengelolaan suku bunga. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan permintaan agregat dan menjaga kestabilan nilai tukar. Peran ini penting karena fluktuasi harga pangan dan energi yang tidak terkendali dapat menciptakan tekanan inflasi dari sisi penawaran.⁵

Dalam praktiknya, peran BI ini terwujud melalui pengawasan ketat terhadap dinamika harga pangan strategis yang rentan terhadap perubahan iklim dan gangguan pasokan. Data dari BPS menunjukkan bahwa kelompok makanan menjadi kontributor signifikan terhadap inflasi tahunan di tahun 2022. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harga pasar memerlukan perhatian khusus terhadap sektor pangan.

³ Sulis Septiani. "Peran Kebijakan Moneter di Indonesia Dalam Menghadapi Inflasi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2022, hlm. 198

⁴ Juhro, Solikin M., and MAE SE. *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

⁵ Warjiyo, Perry. *Kebijakan moneter di indonesia*. Vol. 6. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.

Dengan demikian, mandat dan tanggung jawab BI tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga konkret dalam pelaksanaannya. Analisis isi relasional menunjukkan adanya hubungan kuat antara peran konstitusional BI dengan kebijakan operasional yang berdampak langsung pada kestabilan harga pasar. Ini menegaskan pentingnya BI sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

2. Kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai Pilar Kebijakan

Salah satu instrumen utama BI dalam mengendalikan inflasi adalah kerangka kerja *Inflation Targeting Framework* (ITF), yang diimplementasikan sejak 2005. Dalam ITF, BI menetapkan target inflasi tahunan bersama pemerintah dan menyampaikan proyeksi serta langkah-langkah kebijakan kepada publik secara terbuka. Kerangka ini dinilai mampu menjaga kredibilitas dan memperkuat ekspektasi masyarakat.⁶ Dalam penelitian Astuti, ITF disebut sebagai pendekatan moneter modern yang mampu meredam tekanan harga dengan tetap menjaga kestabilan pasar uang.⁷

Kerangka ITF memberikan fleksibilitas bagi Bank Indonesia dalam menyesuaikan suku bunga acuan terhadap dinamika inflasi. Ketika tekanan inflasi meningkat, seperti yang terjadi pada 2022, BI menaikkan suku bunga acuan dari 3,5% menjadi 5,75% untuk meredam ekspektasi inflasi.

⁶ Wardhono, Adhitya, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi, 2019.

⁷ Astuti, Rr. Ernawati. "Peran Bank Sentral Dalam Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan*, 2025.

Langkah ini memperlihatkan keterhubungan antara teori moneter dan tindakan nyata di lapangan.⁸

Selain itu, ITF mendukung pendekatan kebijakan yang *forward-looking*. Artinya, BI tidak hanya merespons inflasi yang terjadi, tetapi juga memperkirakan arah inflasi di masa depan. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan indikator ekonomi seperti harga komoditas global, nilai tukar rupiah, dan tingkat permintaan domestik. Konsep ini sejalan dengan pandangan Mishkin bahwa ekspektasi masa depan memengaruhi kebijakan masa kini.⁹

Keunggulan ITF juga terletak pada transparansi kebijakan. Dengan mengumumkan target inflasi dan alasan di balik kebijakan suku bunga, BI mendorong partisipasi pasar dan membangun kepercayaan publik. Kejelasan arah kebijakan ini juga mendorong dunia usaha untuk membuat keputusan investasi yang lebih rasional.

Relasi antar konsep dalam kerangka ITF menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal menetapkan angka target, tetapi menciptakan sistem komunikasi, pengawasan, dan koordinasi yang konsisten. Oleh karena itu, ITF bukan sekadar instrumen teknis, melainkan kerangka strategis yang menghubungkan teori, ekspektasi publik, dan hasil kebijakan secara simultan.

⁸ Sundoro, Fredericho Mego, et al. "Penerapan Inflasi Targeting di Indonesia dalam Analisis Bibliometrik." *Solusi* 23.1 (2025): 126-140.

⁹ Wardhono, Adhitya, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi, 2019.hlm. 88

3. Pengelolaan Ekspektasi Inflasi melalui Komunikasi Kebijakan

Selain kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga mengelola ekspektasi inflasi masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan terstruktur. Wulandari dan Harianto menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada bagaimana bank sentral membentuk harapan publik. Bank Indonesia secara rutin menerbitkan laporan seperti "Laporan Perekonomian Indonesia" dan "Kajian Stabilitas Keuangan" untuk menyampaikan proyeksi inflasi dan arah kebijakan.¹⁰

Komunikasi yang efektif memengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Ketika publik mengetahui bahwa BI menargetkan inflasi dalam batas tertentu, mereka cenderung menyesuaikan pola konsumsi dan harga jual sesuai dengan ekspektasi tersebut. Dengan demikian, ekspektasi yang terkelola akan membantu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.¹¹

Transparansi ini menjadi bagian dari strategi penguatan kredibilitas kebijakan moneter. Dalam situasi krisis atau tekanan harga, kejelasan arah kebijakan sangat penting untuk mencegah kepanikan pasar. Publikasi berkala BI memperlihatkan proyeksi inflasi, langkah suku bunga, serta faktor-faktor global dan domestik yang memengaruhi harga.¹²

Komunikasi kebijakan juga mencakup edukasi ekonomi kepada masyarakat. Bank Indonesia melakukan sosialisasi melalui media, seminar,

¹⁰ Siti Wulandari dan Rudi Harianto, "Transparansi Kebijakan BI dalam Pengelolaan Ekspektasi Inflasi," *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 87.

¹¹ Aryansyah, Ary Fakturrachman, et al. *Dasar-Dasar Teori Inflasi: Dari Pemikiran Klasik Hingga Keynesian*. Penerbit Widina, 2025.

¹² Juhro, Solikin M., and MAE SE. *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

dan platform digital agar masyarakat memahami konteks kebijakan moneter. Hal ini memperkuat keterkaitan antara lembaga moneter dan perilaku ekonomi masyarakat.

Dengan menggunakan analisis isi relasional, dapat dipahami bahwa komunikasi kebijakan merupakan simpul penghubung antara ekspektasi, keputusan ekonomi, dan realisasi inflasi. Peran ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya teknis, tetapi juga psikologis dan sosial melalui pembentukan ekspektasi publik.

4. Sinergi Lintas Lembaga: TPIP dan TPID

Dalam pengendalian inflasi pangan, Bank Indonesia berperan aktif dalam forum koordinasi lintas lembaga, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID). Forum ini menjadi sarana integrasi antara kebijakan moneter dan sektor riil, khususnya dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan. Penelitian oleh Mardiyanto menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan memiliki korelasi signifikan terhadap tingkat inflasi nasional, sehingga koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam meredam tekanan harga.¹³

TPIP dan TPID mendorong kolaborasi antara BI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah. Dalam forum ini, BI berperan sebagai inisiator perumusan strategi stabilisasi harga

¹³ Ilyas Cahaya Mardiyanto, *Pengaruh Volatilitas Harga Pangan terhadap Inflasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 22 No. 2, 2021, hlm. 145.

pangan, termasuk pelaksanaan operasi pasar, penguatan cadangan pangan, dan perbaikan sistem distribusi.¹⁴

Koordinasi ini sangat penting, mengingat banyak faktor pemicu inflasi berasal dari sisi penawaran yang berada di luar jangkauan kebijakan moneter langsung. Misalnya, gagal panen, cuaca ekstrem, dan gangguan logistik yang menyebabkan kelangkaan komoditas strategis. TPID menjadi ujung tombak respons cepat di daerah.

Bank Indonesia juga mendorong inovasi data harga melalui digitalisasi informasi pangan antarwilayah. Transparansi data harga akan membantu daerah dalam membuat keputusan cepat dan tepat untuk menahan lonjakan harga yang berisiko menciptakan gejolak inflasi lokal.

Analisis relasional terhadap peran TPIP dan TPID menunjukkan keterkaitan langsung antara efektivitas koordinasi lintas sektor dengan kestabilan inflasi. Sinergi ini memperluas cakupan peran BI dari teknis ke struktural, dari pusat ke daerah, dan dari pasar uang ke pasar bahan pangan.

5. Tinjauan Literatur Terkait dan Keterkaitan Variabel

Studi sebelumnya oleh Nasution menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai langkah preventif terhadap ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan tujuan penelitian ini, yakni memahami peran Bank Indonesia dalam menjaga inflasi harga pasar agar tetap dalam batas wajar. Variabel inflasi

¹⁴ Bank Indonesia, Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 Tahun 2024, Jakarta: Bank Indonesia, 2024, hlm. 56.

dalam penelitian ini dikaitkan dengan peran BI dalam menggunakan kerangka kebijakan, komunikasi, serta koordinasi lintas lembaga.

Ilyas Cahaya Mardiyanto dalam penelitiannya menemukan bahwa kelompok volatile food memiliki kontribusi besar terhadap inflasi, dan intervensi pemerintah dalam pengelolaan distribusi pangan menjadi kunci utama pengendaliannya. Ini menunjukkan hubungan langsung antara peran BI melalui TPID dan stabilitas harga pangan.¹⁵

Penelitian Wulandari & Harianto juga memperkuat bahwa ekspektasi publik yang terbentuk melalui komunikasi bank sentral memengaruhi inflasi aktual. Maka dari itu, strategi komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian dari sistem kontrol terhadap harga-harga pasar.¹⁶

Relasi antar variabel diperkuat oleh hasil analisis bahwa kerangka ITF sebagai instrumen moneter berdampak pada stabilitas harga ketika didukung oleh ekspektasi publik dan koordinasi sektoral. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara variabel peran BI dan variabel inflasi harga pasar secara berlapis.¹⁷

Kesimpulannya, dengan pendekatan analisis isi relasional, dapat ditunjukkan bahwa peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi harga pasar melibatkan interaksi simultan antara kebijakan moneter, komunikasi

¹⁵ Ilyas Cahaya Mardiyanto, *Volatile Food dan Upaya Pengendalian Inflasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 45.

¹⁶ Siti Wulandari dan Rudi Harianto, "Transparansi Kebijakan BI dalam Pengelolaan Ekspektasi Inflasi," *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 87.

¹⁷ Sulis Septiani, *Efektivitas Inflation Targeting Framework dalam Menjaga Stabilitas Harga di Indonesia*, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 88.

publik, dan sinergi kelembagaan. Keseluruhan ini mendukung integrasi teori dan praktik dalam sistem ekonomi nasional.

B. Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari mandatnya sebagai otoritas moneter dan makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana lembaga-lembaga keuangan, pasar, dan infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, menahan guncangan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Dalam konteks ini, Bank Indonesia memegang peranan penting tidak hanya dalam mencegah krisis keuangan, tetapi juga memastikan keberlangsungan kegiatan ekonomi nasional yang sehat. Analisis dalam subbab ini akan menguraikan secara rinci dimensi peran tersebut melalui pendekatan studi pustaka dan analisis isi relasional.¹⁸

1. Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan dalam Mandat Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan perubahannya menyatakan bahwa selain bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Menurut Mishkin, stabilitas sistem keuangan merupakan landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena kegagalan sistem keuangan dapat menimbulkan efek domino terhadap sektor riil. Dengan demikian, peran BI dalam menjaga stabilitas

¹⁸ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 10th ed., Pearson Education, 2016, hlm. 483.

sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan moneter, tetapi juga menyentuh aspek makroprudensial.¹⁹

Bank Indonesia menjalankan peran ini melalui pemantauan terhadap risiko sistemik yang berasal dari lembaga keuangan, pasar uang, maupun sentimen global. Risiko sistemik merujuk pada potensi gangguan yang bisa berdampak luas terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam Laporan Stabilitas Sistem Keuangan (LSSK) BI Tahun 2023, disebutkan bahwa tekanan terhadap sektor UMKM akibat inflasi dapat berdampak pada peningkatan rasio kredit bermasalah atau NPL.²⁰

Fungsi ini juga diperkuat melalui penyusunan indikator stabilitas keuangan seperti *Financial Stability Index* (FSI), pemantauan rasio likuiditas, serta pengawasan sektor perbankan secara makro. Penekanan dilakukan terhadap lembaga yang berisiko sistemik tinggi, yang bisa menimbulkan contagion effect jika tidak ditangani dengan tepat.²¹

Dengan menggunakan pendekatan analisis isi relasional, dapat dikaitkan bahwa peran BI dalam stabilitas sistem keuangan merupakan kelanjutan dari pengendalian inflasi. Ketika inflasi tinggi, maka daya beli masyarakat menurun, risiko kredit meningkat, dan pada akhirnya dapat mengancam stabilitas lembaga keuangan.

¹⁹ Kuncoro, Haryo. *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.hlm. 55

²⁰ Bank Indonesia. *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan (LSSK) No. 43 Tahun 2023*, hlm. 38.

²¹ Saptia, Yeni, Agus Eko Nugroho, and Muhammad Soekarni. *Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

2. Instrumen Makroprudensial untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

Bank Indonesia mengembangkan berbagai instrumen makroprudensial untuk menjaga ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi. Instrumen tersebut antara lain *rasio Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), *rasio Loan to Value* (LTV), dan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah. Penggunaan instrumen ini bersifat antisipatif terhadap siklus keuangan dan bertujuan untuk meredam ketidakseimbangan dalam intermediasi perbankan.²²

Melalui instrumen makroprudensial, BI dapat menahan potensi pertumbuhan kredit yang terlalu cepat atau agresif, yang berisiko menimbulkan gelembung aset atau bubble di sektor properti dan konsumsi. Penyesuaian LTV misalnya, digunakan untuk mengendalikan pembiayaan di sektor perumahan agar tidak menimbulkan risiko sistemik.²³

Kebijakan makroprudensial juga menyentuh aspek inklusi dan akses keuangan. Misalnya, BI memberikan insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor produktif seperti UMKM. Hal ini memperkuat stabilitas sistem karena sektor riil tetap tumbuh dan menyerap risiko dari sektor keuangan.

Penelitian oleh Rahayu menyebutkan bahwa penerapan makroprudensial yang tepat oleh BI mampu menstabilkan siklus kredit dan

²² Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Makroprudensial: Edisi Desember 2023*, Jakarta: Bank Indonesia, 2023, hlm. 15–16.

²³ Bank Indonesia, *Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV Tahun 2023*, Jakarta: Bank Indonesia, 2023, hlm. 32.

mengurangi volatilitas pasar. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengendalian inflasi, akses kredit, dan stabilitas sistem keuangan saling terhubung erat.²⁴

Melalui analisis isi relasional, dapat dipahami bahwa peran BI dalam menggunakan instrumen makroprudensial adalah bentuk konkret dalam membatasi transmisi risiko dari inflasi ke sektor keuangan, sekaligus menjaga agar sistem keuangan tetap berfungsi dengan sehat dalam mendukung perekonomian nasional.

3. Pengawasan Risiko Sistemik dan Stabilitas Perbankan

Bank Indonesia juga melakukan pemantauan dan analisis risiko sistemik secara rutin. Pengawasan ini dilakukan dengan menganalisis indikator kesehatan perbankan seperti NPL, rasio kecukupan modal (CAR), dan ketahanan likuiditas. Dalam Kajian Stabilitas Keuangan BI 2023, disoroti bahwa NPL sektor konsumsi sempat meningkat akibat tekanan inflasi, namun tetap terjaga di bawah 3%.²⁵

Selain itu, BI aktif dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) bersama OJK, Kemenkeu, dan LPS. Forum ini menjadi wadah komunikasi dan respons cepat terhadap gejolak sistemik. Dalam situasi tertentu, BI juga memberikan dukungan likuiditas jangka pendek kepada perbankan agar tidak terjadi kepanikan pasar.²⁶

²⁴ Rahayu, Dwi. *Kebijakan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 12 No. 1, 2021, hlm. 45.

²⁵ Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan No. 42 Tahun 2023*, Jakarta: Bank Indonesia, 2023, hlm. 18–20.

²⁶ Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan No. 42 Tahun 2023*, Jakarta: Bank Indonesia, 2023, hlm. 24–25.

Pengawasan sistemik juga melibatkan stress testing, yakni simulasi skenario buruk terhadap sektor keuangan. Misalnya, BI melakukan simulasi terhadap lonjakan suku bunga acuan dan dampaknya terhadap rasio NPL dan CAR bank-bank sistemik. Keterlibatan BI dalam pengawasan risiko sistemik menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah bagian integral dari fungsi moneter. Ketika tekanan inflasi tinggi, transmisi risiko ke sektor keuangan harus dicegah dengan pengawasan yang presisi dan respons yang cepat.

Dari sini, keterhubungan antara inflasi ↔ kredit bermasalah ↔ stabilitas sistem keuangan menjadi jelas. Ini memperkuat argumen bahwa kebijakan moneter BI tidak hanya menjaga harga, tetapi juga melindungi keseluruhan sistem keuangan dari guncangan eksternal maupun domestik.

4. Relasi Antara Inflasi, Suku Bunga, dan Stabilitas Keuangan

Salah satu relasi penting yang dikaji dalam penelitian ini adalah hubungan antara inflasi, kebijakan suku bunga, dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Ketika inflasi meningkat, BI akan merespons dengan menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan ini bertujuan meredam permintaan, namun di sisi lain juga meningkatkan biaya kredit.²⁷

Kenaikan suku bunga berdampak pada sektor keuangan melalui dua jalur: meningkatnya beban cicilan masyarakat, yang berpotensi menambah NPL, dan penurunan pinjaman baru karena biaya kredit yang lebih tinggi.

²⁷ Husna, Asmaul, et al. "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Bisnis Perbankan Syariah." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 21.2 (2021): hlm.11.

Ini menekan intermediasi perbankan dan menciptakan potensi risiko stabilitas.²⁸

Dalam laporan OJK dan BI tahun 2022–2023, terlihat bahwa lonjakan inflasi menyebabkan sektor rumah tangga mengalami penurunan kemampuan bayar. Namun, dengan koordinasi TPID dan penyesuaian kebijakan moneter secara gradual, tekanan ini berhasil diredam.

Teori dari Mishkin juga menekankan bahwa pengendalian inflasi harus mempertimbangkan konsekuensi ke sektor keuangan. Oleh karena itu, kebijakan BI tidak bersifat tunggal, tetapi menyeimbangkan antara kebutuhan pengendalian harga dan perlindungan terhadap sistem keuangan.

Analisis relasional menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang responsif dan terukur terhadap inflasi memiliki korelasi positif terhadap kestabilan sistem keuangan. Relasi ini menjadi fokus penting dalam memahami keterpaduan fungsi BI dalam dua domain makroekonomi yang berbeda namun saling terkait.

5. Dukungan Literasi dan Infrastruktur untuk Ketahanan Sistem

Selain instrumen kebijakan dan pengawasan, BI juga membangun fondasi jangka panjang melalui peningkatan literasi keuangan dan penguatan infrastruktur sistem pembayaran. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko keuangan dan cara mengelola utang menjadi bagian dari upaya preventif dalam menjaga stabilitas keuangan.²⁹

²⁸ Agung, Juda, and Cicilia A. Harun. *Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021. Hlm 83

²⁹ Ayustia, Rissa, et al. *Literasi keuangan dan adopsi financial technology untuk usaha kecil dan menengah di daerah perbatasan*. Mega Press Nusantara, 2023.hlm.78

Bank Indonesia menggagas program edukasi keuangan yang menasar berbagai segmen, mulai dari pelajar hingga pelaku UMKM. Program ini memperkuat ketahanan keuangan rumah tangga agar tidak mudah terguncang akibat fluktuasi harga atau kenaikan suku bunga.

Di sisi lain, BI terus memperkuat sistem pembayaran nasional (SNAP) dan mendorong digitalisasi sistem keuangan melalui QRIS. Infrastruktur digital ini mempercepat arus pembayaran dan memperkecil risiko sistemik akibat keterlambatan atau kegagalan sistem transaksi.

Penelitian dari Kusumandari menyatakan bahwa infrastruktur keuangan yang tangguh merupakan salah satu determinan utama kestabilan sistem, terutama dalam era digital. Oleh karena itu, keterkaitan antara literasi, digitalisasi, dan stabilitas menjadi semakin penting untuk diperhatikan.³⁰

Melalui pendekatan studi pustaka dan analisis isi relasional, dapat ditarik benang merah bahwa peran BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan mencakup dimensi preventif, responsif, dan struktural. Ketiga pendekatan ini saling terhubung dan membentuk sistem pertahanan berlapis terhadap guncangan ekonomi yang mungkin timbul dari inflasi atau krisis eksternal lainnya.

C. Keterkaitan Inflasi dan Stabilitas Sistem Keuangan

Keterkaitan antara inflasi dan stabilitas sistem keuangan merupakan relasi yang saling memengaruhi dan menjadi perhatian utama dalam kebijakan

³⁰ Meirawati Kusumandari. "Peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam Mengendalikan Inflasi di Solo Raya." Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret, 2011

ekonomi makro. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, menekan konsumsi, dan menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada keputusan investasi, kredit, serta aliran modal. Sebaliknya, ketidakstabilan sistem keuangan juga dapat memperburuk tekanan inflasi melalui transmisi gangguan terhadap sektor riil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan analisis isi relasional digunakan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana keterkaitan antara dua variabel utama tersebut saling membentuk dinamika kebijakan dan stabilitas ekonomi nasional.³¹

1. Inflasi sebagai Sumber Tekanan terhadap Sistem Keuangan

Inflasi, khususnya yang bersifat volatile dan tidak terprediksi, dapat menciptakan ketegangan dalam sistem keuangan. Ketika inflasi meningkat, suku bunga acuan cenderung dinaikkan untuk menahan permintaan. Kebijakan ini berdampak pada sektor perbankan melalui peningkatan biaya pinjaman, penurunan permintaan kredit, dan potensi peningkatan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Sebagaimana dicatat dalam Laporan Stabilitas Sistem Keuangan BI No. 43 Tahun 2024, tekanan inflasi pangan dan energi pada tahun 2022–2023 memberikan dampak signifikan terhadap sektor konsumsi rumah tangga dan UMKM.³²

³¹ Madyoningrum, Asri Winanti, and MM SE. "TEORI EKONOMI MAKRO." *Teori Ekonomi Makro* (2025): 52.

³² Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan No. 43* (Jakarta: Bank Indonesia, 2024), hlm. 17.

Teori dari Mishkin menjelaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian, memperbesar spread suku bunga, dan mengganggu intermediasi keuangan.³³ Hal ini berdampak pada stabilitas institusi keuangan yang tergantung pada kestabilan nilai uang dan prediktabilitas pasar. Dalam konteks Indonesia, situasi ini pernah terlihat saat inflasi menyentuh angka 5,51% pada 2022, yang mendorong penyesuaian kebijakan moneter secara agresif dan menimbulkan tekanan pada sektor keuangan.

Dengan demikian, inflasi bukan hanya indikator ekonomi makro, tetapi juga potensi sumber risiko sistemik. Ketika daya beli masyarakat melemah, kredit bermasalah meningkat, dan likuiditas pasar menurun, maka stabilitas sistem keuangan terancam. Inilah yang menjadikan kontrol inflasi menjadi aspek utama dari ketahanan sistem keuangan.

2. Transmisi Inflasi terhadap Risiko Sistemik

Transmisi tekanan inflasi terhadap sistem keuangan terjadi melalui berbagai saluran, di antaranya ekspektasi inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan akses pembiayaan. Jika inflasi tidak segera dikendalikan, maka ekspektasi negatif masyarakat akan menciptakan spekulasi harga dan depresiasi mata uang. Hal ini memperburuk risiko sistemik, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki ketergantungan terhadap impor pangan dan energi.³⁴

³³ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 10th ed. (New York: Pearson, 2016), hlm. 459.

³⁴ Wardhono, Adhitya, et al. *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi, 2019. Hlm 45

Ketika ekspektasi inflasi meningkat, bank sentral cenderung merespons dengan menaikkan suku bunga. Namun, suku bunga tinggi dalam jangka panjang akan menekan pertumbuhan kredit dan memperbesar risiko gagal bayar di sektor perbankan. Data OJK tahun 2023 menunjukkan bahwa tekanan inflasi menyebabkan peningkatan NPL dari sektor konsumsi rumah tangga, meskipun masih terkendali di bawah 3%.³⁵

Keterhubungan antara tekanan inflasi dan risiko sistemik juga terlihat dari dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar. Ketika nilai tukar rupiah melemah karena inflasi domestik dan tekanan global, maka impor menjadi lebih mahal dan mendorong inflasi lebih lanjut. Situasi ini menciptakan siklus yang saling memperkuat (*self-reinforcing loop*), yang bila tidak diputus dapat menimbulkan krisis stabilitas.³⁶

3. Pengaruh Stabilitas Sistem Keuangan terhadap Inflasi

Hubungan antara kedua variabel ini bersifat dua arah. Tidak hanya inflasi yang berdampak pada sistem keuangan, tetapi ketidakstabilan sistem keuangan juga dapat mempercepat inflasi. Ketika sektor keuangan terguncang—misalnya karena lonjakan NPL atau krisis likuiditas—maka distribusi kredit terganggu, permintaan barang meningkat akibat gangguan pasokan, dan harga-harga melonjak.³⁷

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Stabilitas Sektor Jasa Keuangan 2023* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 33.

³⁶ Syarifuddin, Ferry. *Konsep, dinamika, dan respon kebijakan nilai tukar di Indonesia*. Bank Indonesia Institute, 2015.

³⁷ Darwis Harahap, S. H. I., and M. E. Sulaiman Efendi. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Penelitian oleh Rahayu menyebutkan bahwa krisis sistem keuangan dapat mendorong inflasi melalui efek kepercayaan dan kelangkaan barang. Situasi ini diperburuk jika pemerintah harus melakukan pembiayaan defisit melalui pencetakan uang, yang menambah tekanan inflasi.³⁸

Stabilitas sistem keuangan juga menentukan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi. Ketika sistem keuangan stabil, transmisi kebijakan moneter (seperti penyesuaian suku bunga) menjadi lebih efektif karena kepercayaan pasar tetap terjaga. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sektor perbankan, pasar uang, dan infrastruktur pembayaran menjadi bagian integral dari upaya pengendalian inflasi.³⁹

4. Keterkaitan Relasional: Integrasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

Analisis isi relasional menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan moneter (untuk mengendalikan inflasi) dan kebijakan makroprudensial (untuk menjaga stabilitas keuangan) menjadi syarat utama dalam menciptakan kestabilan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia tidak dapat bekerja secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi.

Sejak diterapkannya kebijakan dual mandate (moneter dan makroprudensial), BI menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga stabilitas harga dan menjaga ketahanan sistem keuangan. Sebagai contoh,

³⁸ Rahayu, Dwi. "Stabilitas Sistem Keuangan dan Inflasi: Pendekatan Makroprudensial di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22 No. 1 (2021): hlm. 92.

³⁹ Warjiyo, Perry. *Kebijakan moneter di indonesia*. Vol. 6. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.

ketika BI menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi, maka pada saat yang sama BI melonggarkan rasio GWM atau mendorong relaksasi kredit produktif guna menjaga keseimbangan sektor keuangan.⁴⁰

Keterkaitan antara kedua kebijakan ini juga diperkuat melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang menjadi wadah integrasi lintas lembaga seperti OJK, Kemenkeu, dan LPS. Dengan adanya forum ini, langkah antisipatif terhadap tekanan inflasi yang berpotensi mengganggu sektor keuangan dapat direspons secara kolektif.

Dengan demikian, keterkaitan antara inflasi dan stabilitas sistem keuangan tidak dapat dipisahkan dalam implementasi kebijakan. Keduanya merupakan bagian dari sistem yang saling bergantung. Ketika salah satu terganggu, maka yang lain akan terdampak.

5. Kesimpulan Analitis terhadap Keterkaitan Variabel

Dari analisis relasional yang dilakukan terhadap berbagai literatur, data, dan laporan resmi, dapat disimpulkan bahwa inflasi dan stabilitas sistem keuangan memiliki hubungan kausal yang saling memengaruhi. Inflasi yang tidak terkendali akan menimbulkan tekanan terhadap sektor keuangan, sedangkan ketidakstabilan sistem keuangan juga akan memperburuk inflasi.

Peran Bank Indonesia menjadi strategis karena berada di titik temu antara kedua variabel tersebut. Sebagai otoritas moneter dan makroprudensial, BI memiliki mandat, instrumen, dan kapasitas untuk

⁴⁰ Syarifuddin, Ferry, and Ali Sakti. *Instrumen Moneter Islam-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.

menjaga keseimbangan keduanya secara simultan. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, keterpaduan peran BI dalam mengelola inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan harus terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, transparansi kebijakan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.⁴¹

Studi pustaka ini menunjukkan bahwa keterkaitan antarvariabel bukan hanya teoritis, tetapi juga nyata dan terukur dalam konteks Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan untuk mengukur sensitivitas variabel tersebut dalam menghadapi gejolak ekonomi global maupun tekanan domestik yang bersifat musiman dan struktural.

⁴¹ Purnomo, Boyke Rudy. *Manajemen di Era Digital: Perspektif Keuangan, Inovasi, dan UMKM*. UGM PRESS, 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan melalui pendekatan studi pustaka dan analisis isi relasional, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi Harga Pasar sangat erat kaitannya dengan mandat konstitusionalnya sebagai otoritas moneter nasional. Bank Indonesia menjalankan tanggung jawab ini melalui penerapan kebijakan moneter dalam kerangka Inflation Targeting Framework (ITF), pengelolaan ekspektasi inflasi publik melalui komunikasi kebijakan, serta sinergi lintas sektor melalui forum TPIP dan TPID. Peran ini menjadi penting mengingat inflasi harga pasar, khususnya dari sektor volatile food, berkontribusi besar terhadap tekanan inflasi nasional.
2. Bank Indonesia juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Stabilitas sistem keuangan dipertahankan melalui instrumen makroprudensial, pengawasan risiko sistemik, dan forum koordinasi kebijakan lintas lembaga seperti FKSSK. BI melakukan pengawasan terhadap indikator-indikator penting seperti NPL, CAR, dan likuiditas, serta menjalankan kebijakan antisipatif terhadap potensi guncangan sistemik.
3. Terdapat keterkaitan yang erat antara variabel inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Inflasi yang tinggi dapat memicu peningkatan risiko sistemik,

menurunkan daya beli, dan mengganggu fungsi intermediasi sektor keuangan. Sebaliknya, ketidakstabilan sistem keuangan dapat memperparah inflasi melalui gangguan pasokan kredit dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan bagian integral dari strategi menjaga stabilitas sistem keuangan secara nasional.

4. Analisis relasional terhadap literatur, data, dan teori menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia tidak dapat dipisahkan antara fungsi moneter dan makroprudensial. Keduanya berjalan secara simultan dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan BI tidak hanya berdampak pada kestabilan harga, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem keuangan dalam menghadapi guncangan eksternal maupun domestik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Bank Indonesia, disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, khususnya dalam konteks harga pasar kebutuhan pokok, dengan mengoptimalkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID. Penguatan kapasitas digitalisasi sistem pemantauan harga, serta respons kebijakan berbasis data yang real-time perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan inflasi yang bersifat musiman maupun struktural.

2. Kepada pemerintah daerah, khususnya yang menjadi bagian dari TPID, diharapkan mampu memperkuat peran dalam mendukung stabilitas harga pangan di wilayah masing-masing dengan menyediakan infrastruktur distribusi, akses logistik, dan sinergi data harga dengan Bank Indonesia. Peran ini penting dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat akar rumput yang selama ini menjadi sumber utama tekanan inflasi.
3. Kepada pelaku sektor keuangan, termasuk lembaga perbankan dan investor, disarankan untuk merespons kebijakan moneter Bank Indonesia secara proporsional dan memperhatikan sinyal kebijakan BI, seperti perubahan suku bunga acuan, sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Partisipasi aktif dalam menjaga ekspektasi inflasi tetap rasional juga dibutuhkan agar kestabilan ekonomi tetap terjaga.
4. Kepada akademisi dan peneliti, saran untuk mengembangkan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus regional untuk menilai efektivitas langsung kebijakan moneter dan makroprudensial BI dalam konteks lokal. Hal ini dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat terhadap formulasi kebijakan publik.
5. Kepada masyarakat umum, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan moneter dan peran Bank Indonesia dalam menjaga inflasi dan stabilitas keuangan. Sikap konsumsi yang bijak, respons terhadap informasi harga, serta partisipasi dalam program edukasi keuangan menjadi bagian dari kontribusi kolektif dalam mendukung kestabilan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur Hidayat, *Buku Ajar Ekonomi Moneter Internasional*, Yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arifin, Zainul. *Kebijakan Moneter dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Astuti, Rr. Ernawati. "Peran Bank Sentral Dalam Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan*, 2025.
- Ayustia, Rissa, et al. *Literasi Keuangan dan Adopsi Financial Technology untuk Usaha Kecil dan Menengah di Daerah Perbatasan*. Mega Press Nusantara, 2023.
- Bank Indonesia. *Inflation Targeting Framework: Strategi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2022.
- Bank Indonesia. *Kajian Stabilitas Keuangan No. 42 Tahun 2023*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Bank Indonesia. *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan No. 43 Tahun 2024*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- Bank Indonesia. *Laporan Kebijakan Makroprudensial: Edisi Desember 2023*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Bank Indonesia. *Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV Tahun 2023*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi 2020–2023*. Jakarta: BPS, 2024.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. *Macroeconomics*, 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Frederic S. Mishkin. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. New Jersey: Pearson Education, 2016.
- Ilyas Cahaya Mardiyanto. *Analisis Volatilitas Harga Pangan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Inflasi*. Skripsi. Universitas Tidar, 2023.

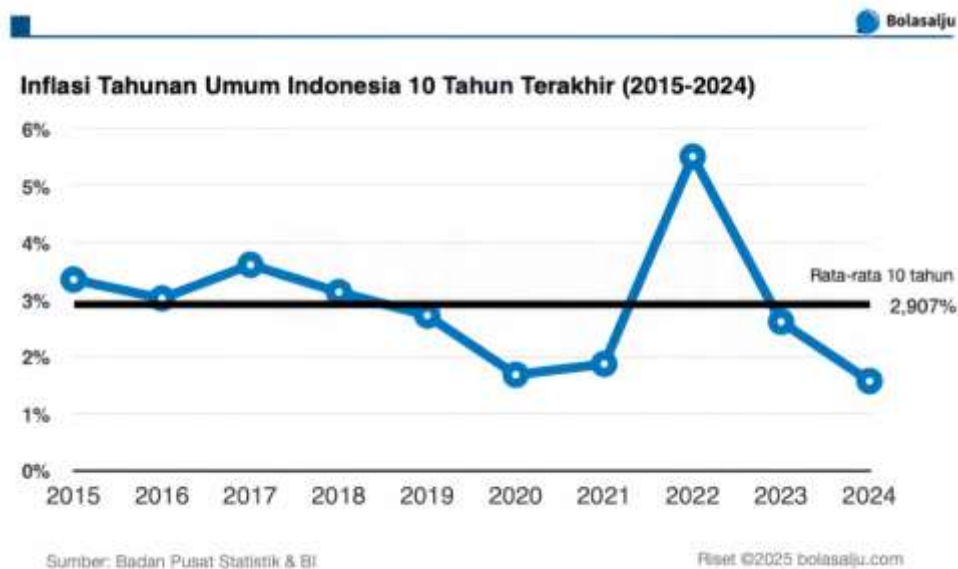
- Ilyas Cahaya Mardiyanto. "Volatile Food dan Upaya Pengendalian Inflasi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Juhro, Solikin M., and MAE SE. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Kuncoro, Haryo. *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics*, 8th ed. New York: Worth Publishers, 2012.
- Mardiyanto, Ilyas Cahaya. "Pengaruh Volatilitas Harga Pangan terhadap Inflasi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22 No. 2, 2021.
- Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 10th Edition. New York: Pearson Education, 2016.
- Nasution, Nazly Dayanty. *Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Indonesia Melalui Pengendalian Inflasi*. Skripsi Minor. UIN Sumatera Utara, 2018.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Rahayu, Dwi. "Kebijakan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1, 2021.
- Saptia, Yeni, Agus Eko Nugroho, and Muhammad Soekarni. *Perluasan Akses Keuangan UMKM Berbasis Tekfin di Indonesia dan Pengalaman Negara Tetangga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Septiani, Sulis. "Efektivitas Inflation Targeting Framework dalam Menjaga Stabilitas Harga di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wulandari, Siti & Harianto, Rudi. "Transparansi Kebijakan BI dalam Pengelolaan Ekspektasi Inflasi." *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Zed, M. *Literature Searching: Langkah-langkah Praktis Pencarian Data dan Informasi Ilmiah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

LAMPIRAN

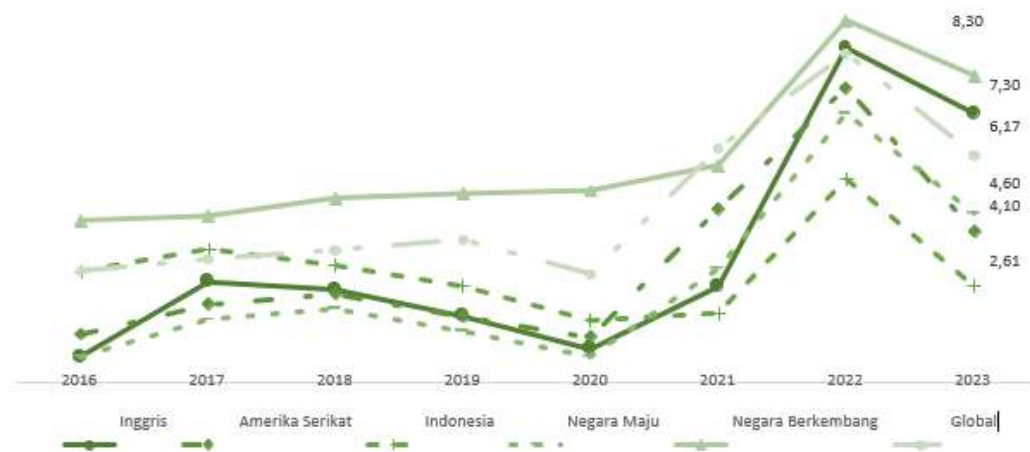
1. Stuktur Organisasi Bank Indonesia



2. Grafik Inflasi Tahunan di Indonesia



3. Inflasi Perbandingan dengan negara lain



Catatan: Inflasi Indonesia 2015-2019 menggunakan IHK 82 kota (2012=100) dan inflasi 2020-2022 menggunakan IHK 90 kota (2018=100)

Sumber: *International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024.*

4. Kelompok penyumbang Inflasi

Laju dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (Y-o-Y) (persen), 2022 dan 2023 (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	2022		2023	
	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umum	5,51	5,51	2,61	2,61
Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,83	1,51	6,18	1,60
Pakaian dan Alas Kaki	1,40	0,08	0,78	0,04
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,78	0,74	0,5	0,10
	4,86	0,29	1,57	
Kesehatan	2,87	0,08	1,94	0,05
Transportasi	15,26	1,84	1,27	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,36	-0,02	0,2	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,04	0,06	1,69	0,04
Pendidikan	2,77	0,16	1,97	0,11
Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	4,49	0,40	2,07	0,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,91	0,37	3,55	0,22

5. Inflation Targeting Framework (ITF)

2001	4% - 6%	12,55
2002	9% - 10%	10,03
2003	9±1%	5,06
2004	5,5±1%	6,40
2005	6±1%	17,11
2006	8±1%	6,60
2007	6±1%	6,59
2008	5±1%	11,06
2009	4,5±1%	2,78
2010	5±1%	6,96
2011	5±1%	3,79
2012	4,5±1%	4,30
2013	4,5±1%	8,38
2014	4,5±1%	8,56
2015	4±1%	3,35
2016	4±1%	3,02
2017	4±1%	3,61
2018	3,5±1%	3,13
2019**	3,5±1%	2,72
2020**	3±1%	1,68
2021**	3±1%	1,87
2022*	3±1%	5,51
2023*	3±1%	2,61
2024*	2,5±1%	1,57
2025*	2,5±1%	

6. Inflasi



Sumber: BPS, diolah

7. Laporan perekonomian Keuangan Indonesia

SINERGI MEMPERKUAT PERLUASAN HILIRISASI PANGAN

Hilirisasi pangan mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan karenanya mampu meningkatkan penghasilan dan konsumsi masyarakat.

ASTA CITA #2
 Respon Cepat Pangan, Penguatan Produk Pangan, Pengendalian Impor Pangan, Jaring Pengaman, Ketahanan Pangan

KOMODITAS STRATEGIS

JANGKA PENDEK

- Padi dan Beras
- Cabai dan Olahahan
- Bawang dan Olahahan
- Ikan dan Olahahan (termasuk rumput laut)

JANGKA PANJANG

- Tebu & Gula
- Kopi & Kakao
- Minyak & Kelapa
- Minyak & Kelapa

HULU

BUDIDAYA

TEKNOLOGI BUDIDAYA

PROSES PRODUKSI

TEKNOLOGI PASCA PANEN

PASCAPANEN & HILIRISASI

BUMAH PENGOLAHAN/DISTRIBUTION CENTER

MODERN RICE MILLING PLANT

PEMASARAN

Supermarket, Minimarket, Warung, Toko Kelontong, Toko Tradisional, Pasar, Toko Online, Toko Ritel, Toko Grosir, Toko Eceran, Toko Ritel, Toko Grosir, Toko Eceran, Toko Ritel, Toko Grosir, Toko Eceran

AGROINPUT

Pestisida, Benih & Sapijutan, Pupuk, Obat-obatan, Alat & Mesin

PEKAR PRODUKSI GEMUKA (TUMBUH/PAKSIKAS)

KONSUMEN

HILIR

PEMULIHAN SEKTOR PADAT KARYA

II INFLASI

Y PERTUMBUHAN EKONOMI

SWASEMBADA PANGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id e-mail iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2760/In.28.3/D.1/TL.00/1/2025

Metro, 30 Januari 2025

Lampiran : -

Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Enny Puji Lestari M.E.Sy (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Hendri Ari Setiawan
NPM : 1903022006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Judul : Peran Bank Indonesia (BI) Dalam Mengawasi Inflasi Pada Harga Pasar Dalam Menstabilkan Sistem Keuangan Di Tinjau Dari Peran Surveyor (BI) Dipasar Tejo Agung

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan $\pm$ 1/6 bagian
 - b. Isi $\pm$ 2/3 bagian
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/J/TL.01//2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala pasar Pasar Tejo Agung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala pasar Pasar Tejo Agung berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

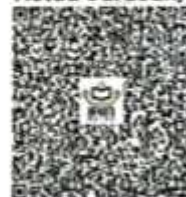
Nama	: HENDRI ARI SETIAWAN
NPM	: 1903022006
Semester	: 12 (Dua Belas)
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul	: Peran bank indonesia (BI) dalam mengawasi inflasi pada : harga pasar dalam menstabilkan sistem keuangan di tinjau dari peran surveyor (BI) di pasar tejo agung

untuk melakukan prasurvey di Pasar Tejo Agung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala pasar Pasar Tejo Agung untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Ketua Jurusan,



Anggoro Sugeng
NIP 199005082020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metronity.ac.id Website : www.febi.metronity.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Hendri Ari Setiawan

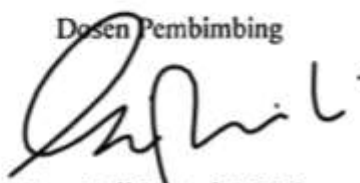
Fakultas/Jurusan : FEBI/SIPBS

NPM : 1903022006

Semester/TA : XII/2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	kamis, 12 juni 2025	Ace Untule Di seminar kan	

Dosen Pembimbing


Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIP. 198106132025212002

Mahasiswa Ybs,


Hendri Ari Setiawan
NPM. 1903022006

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Peneliti bernama Hendri Ari Setiawan lahir di Desa Bumi Harjo tanggal 27 Januari 1996, peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara hasil pernikahan pasangan Bapak Basori dan Ibu Siti Hartini. Bertempat tinggal di Desa Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Peneliti merasa sangat bangga dan bahagia karena lahir dikeluarga yang sangat menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a serta dukungan dari keluarga baik secara material maupun non material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Peneliti menyelesaikan pendidikan yang pernah ditempuh di SD Negeri 01 Bumi Harjo lulus pada tahun 2008, dan melanjutkan sekolah di Mts Darul Ulum Bumiharjo dan lulus pada tahun 2011, kemudian peneliti melanjutkan sekolahnya di MA Darul Ulum Bumi Harjo dan lulus pada tahun 2014, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) dikampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dan mengambil Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).